

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA
BAGI PEMEGANG HAK CIPTA LOGO**

SKRIPSI



OLEH

Ishak Bisma Widiyanto

NIM : 02111098

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA**

2016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang dan Rumusan masalah	1
1.2 Penjelasan Judul	7
1.3 Alasan Pemilihan Judul	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	8
1.6 Metode Penelitian	9
1.6.1 Pendekatan Masalah	9
1.6.2 Sumber Bahan Hukum	10
1.6.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	11
1.6.4 Analisis Bahan Hukum	11
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika	12

BAB II LOGO TERMASUK KARYA SENI DALAM RUANG LINGKUP

HAK CIPTA	13
-----------------	----

2.1 Kedudukan Ciptaan Logo dalam Undang-Undang Hak Cipta	13
--	----

2.2 Hak Berkaitan dengan Hak Cipta Logo	23
---	----

2.3 Urgensi Perlindungan Terhadap Hak Cipta Logo	25
--	----

2.4 Kepastian Hukum Perlindungan Hak Cipta Logo	33
---	----

BAB III PENYELESAIAN SENGKETA CIPTAAN LOGO	39
--	----

3.1 Sengketa Ciptaan Logo	39
---------------------------------	----

3.2 Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan	40
--	----

3.3 Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan	48
---	----

BAB IV PENUTUP	54
----------------------	----

4.1 Kesimpulan	54
----------------------	----

4.2 Saran	55
-----------------	----

DAFTAR PUSTAKA



Lembar Pengesahan

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 9 April 2016**

Oleh Dosen Pembimbing :



M. Yusron MZ., SH., MH.

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Narotama**



Tahegga Primananda Alfath, SH., MH.

ABSTRAK

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) merupakan lembaga yang ditugaskan untuk memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) seperti hak cipta logo. Pencipta dari suatu logo bisa mendapatkan perlindungan atas ciptaannya dengan cara mendaftarkan ciptaannya tersebut. Ciptaan berupa logo tidak dapat dicatatkan dan sebagai akibatnya ciptaan berupa logo tidak akan mendapatkan petikan resmi atas ciptaannya. Hal ini tentu akan mengancam perlindungan terhadap ciptaan logo tersebut, yaitu berpotensi ditiru atau diplagiasi dan diakui sebagai ciptaan pihak lain. Saat ini Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menentukan bahwa logo tidak dapat dicatatkan, hal tersebut tentu berpotensi menciptakan banyak plagiasi dan pembuktiannya siapa pemegang hak ciptaan juga sulit. Saat ini Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menentukan bahwa logo tidak dapat dicatatkan, hal tersebut tentu berpotensi menciptakan banyak plagiasi dan pembuktiannya siapa pemegang hak ciptaan juga sulit. Perlindungan hukum tersebut tidak Perlindungan hukum tersebut tidak maksimal, karena jika logo tidak dicatatkan, maka tidak tercatat siapa pemegang haknya dan berpotensi menimbulkan plagiasi dan duplikasi serta publikasi tanpa ijin dari pihak yang berhak. Penyelesaian sengketa ciptaan logo dapat dilakukan di luar pengadilan dan di Pengadilan. Akan tetapi jika para pihak ingin meminta penetapan sementara ke pengadilan dengan melampirkan bukti kepemilikan hak cipta. Ketentuan ini sulit untuk diterapkan pada sengketa hak cipta logo yang tidak dapat dicatatkan.

Kata kunci : perlindungan hukum, hak cipta, logo



ABSTRACT

Directorate General of Intellectual Property Rights (Dirjen HKI) is an institution authorized to provide protection of intellectual property rights (HKI) such as copyright logo. Creator of the logo can get protection of his creation by registering the creation. Creation in the form of the logo can't be recorded and as a result the creation of the form of the logo will not get official excerpt of his creation. This of course would threaten the protection of the creation of the logo, which has the potential to be replicated or plagiarism and is recognized as a creation of others. Currently the Act No. 28 of 2014 on Copyrights determines that the logo can't be recorded, it certainly has the potential to create a lot of plagiarism and proof who the rights holders of creation is also difficult. Currently the Act No. 28 of 2014 on Copyrights determines that the logo can't be recorded, it certainly has the potential to create a lot of plagiarism and proof who the rights holders of creation is also difficult. Protection of the law is no legal protection is not optimal, because if the logo is not listed, then it is not recorded who the rights holders and potential plagiarism and duplication as well as the publication without permission of the party entitled. Dispute resolution logo creation can be done outside the court and in court. However if the parties want to request a provisional decision to court to attach proof of copyright ownership. This provision is difficult to apply on a copyright dispute that the logo can't be recorded.

Keywords: legal protection, copyright, logo



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

4.1.1. Logo termasuk karya seni dalam ruang lingkup hak cipta

Logo termasuk salah satu karya seni yang termasuk dalam ruang lingkup hak cipta. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta logo UU No. 28 tahun 2014 adalah semua ciptaan dalam berbagai bidang mendapat perlindungan hukum dalam ruang lingkup HKI (Pasal 40 UU No. 28 tahun 2014). Ciptaan yang dilindungi di antara hal-hal yang dilindungi tersebut adalah hak cipta logo. Kendati demikian, tidak semua dari ciptaan yang dilindungi tersebut dapat dicatatkan dan mendapatkan surat pendaftaran ciptaan, salah satu yang dikecualikan adalah hak cipta logo yang tidak dapat dicatatkan (Pasal 65 UU No. 28 tahun 2014). Perlindungan hukum tersebut tidak maksimal, karena jika logo tidak dicatatkan, maka pembuktian siapa yang lebih dulu menciptakan suatu ciptaan logo tersebut sangat sulit, tidak tercatat siapa pemegang haknya dan berpotensi menimbulkan plagiasi dan duplikasi serta publikasi tanpa izin dari pihak yang berhak. Tidak dicatatkannya hak cipta logo tersebut juga tidak mendukung pemenuhan hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada suatu hak cipta.

4.1.2. Penyelesaian Sengketa Ciptaan Logo

Penyelesaian sengketa ciptaan logo dapat dilakukan di luar pengadilan dan di Pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan dapat dilakukan dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa yaitu mediasi, negosiasi dan konsiliasi dan arbitrase. Ketentuan alternatif penyelesaian sengketa tersebut lebih sempit apa yang sudah diatur dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menentukan bahwa alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Selanjutnya penyelesaian di Pengadilan hanya dapat dilakukan di Pengadilan Niaga. Akan tetapi jika para pihak ingin meminta penetapan sementara ke pengadilan seperti penyitaan barang sengketa dan lain sebagainya, maka syaratnya adalah melampirkan bukti kepemilikan hak cipta atau hak terkait. Ketentuan ini sulit untuk diterapkan pada sengketa hak cipta logo yang tidak dapat dicatitkan. Selain itu, juga tidak ada ketentuan tata cara pembuktian hak cipta yang tidak dapat dicatitkan.

4.2. Saran

1. Hak cipta logo seharusnya bisa dicatitkan atau diatur mekanisme lain supaya jelas siapa pemegang hak atas logo tersebut. Hal tersebut jelas memberikan perlindungan bagi pemegang hak. Jika tidak dicatitkan, maka hak cipta logo bisa menimbulkan sengketa dan pembuktiannya sulit karena tidak ada surat pendaftaran ciptaan maupun petikan resmi.
2. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan seharusnya bisa lebih diutamakan seperti yang diatur dalam dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menentukan bahwa alternatif penyelesaian sengketa

dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- AA, Eka dan Marye AK, *Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis*, RAS, Bogor, 2010
- Alonso (ed), Guiomar. *Kebudayaan, Perdagangan dan Globalisasi*, Kanisius, Yogyakarta, 2005
- Fernando, E. dan M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Buku Kompas, Jakarta, 2007
- Goldstein, Paul. *Hak Cipta : Dahulu, Kini dan Esok*, YOI, Jakarta, 1997
- Kadir, Abdul. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Lubis, Irwansyah. *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2010
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Kencana, Malang, 2007
- Raharjo, Satjipto. *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2003
- Ruslan, Surianto. *Mendesain Logo*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009
- Rocky et al, *Kamus Hukum Lengkap*, Visimedia, Jakarta, 2012
- S.I, Edi. *Pajak Kepemimpinan dan Masa Depan*, Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah, Semarang, 2013
- Sari, Elsi Kartika dan Advendi Simangunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta, Grasindo, 2004
- Soemartono, Gatot P. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2006
- Suharyadi et all, *Kewirausahaan, Membangun Usaha Sukses Sejak Usia Muda*, Salemba Empat, Jakarta, 2007
- Tim VisiMedia, *Panduan Resmi Hak Cipta*, VisiMedia, Jakarta, 2015
- YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, YLBHI dan AusAID, Jakarta, 2006
- Z, Muhammad Lailatul Qodri. *Panduan Lengkap HRD dan GA*, RAS, Bogor, 2014

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 07 PK/Pdt.Sus/ 2011

JURNAL

Semedi, B. *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum*, Artikel Pusdiklat Bea dan Cukai Edisi, Desember 2013

Talib, Idris. *Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi*, Jurnal Lex et Societatis, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013

INTERNET

Mahfud MD, Moh. *Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, diakses dari website www.mahfudmd.com, tanggal 04/02/2016